



PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025 - 2029

**DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA SOLOK**

LAMPIRAN 7
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan ke hadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, atas berkat rahmat-Nya lah, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Renstra Dinas PUPR) Kota Solok Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Dinas PUPR ini disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kota Solok wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok.

Selanjutnya diharapkan Renstra Dinas PUPR Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan pada tingkatan perencanaan/penganggaran tahunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tak lupa ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini semoga dapat menjadi amalan yang diganjar pahala oleh Allah Subhanallahu Wa Ta'ala.

Solok, 2025

**KEPALA DINAS PEKERJAAN
& UMUM DAN PENATAAN RUANG** *di.*

AFRIZAL, M.Eng

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19680415 199703 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
BAB I PENDAHULUAN		I.1
1.1	Latar Belakang	I.1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I.2
1.3	Maksud dan Tujuan	I.4
1.4	Sistematika Penulisan	I.5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		II.1
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II.1
2.1.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	II.1
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	II.7
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.11
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan	II.19
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II.19
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II.19
2.2.2	Isu Strategis	II.21
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		III.1
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III.1
3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III.4
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		IV.1
4.1	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	IV.1
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Urusan	IV.39
BAB V PENUTUP		V.1
5.1	Kesimpulan	V.1
5.2	Kaidah Pelaksanaan	V.1
5.3	Pengendalian dan Evaluasi	V.2
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia menurut Jenis Kelamin	II-7
Tabel 2.2	Sumber Daya Manusia menurut Pendidikan	II-8
Tabel 2.3	Sumber Daya Manusia menurut Jabatan	II-8
Tabel 2.4	Gambaran Sarana dan Prasarana Dinas PUPR dan Kondisinya	II-9
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan PUPR dan Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024	II-13
Tabel 2.6	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas PUPR	II-20
Tabel 2.7	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas PUPR	II-22
Tabel 3.1	Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas PUPR Kota Solok Tahun 2025-2029	III-3
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas PUPR Kota Solok Tahun 2025-2029	III-5
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan	III-6
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Dinas PUPR Kota Solok 2025-2029	IV-2
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas PUPR Kota Solok Tahun 2025-2029	IV-14
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-38
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas PUPR Kota Solok 2025-2029	IV-40
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Renstra Dinas PUPR Kota Solok 2025-2029	IV-41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan bagi setiap perangkat daerah yang disusun sebagai perencanaan komprehensif selama kurun waktu lima tahunan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk penjabaran lebih detail dan mendalam, Renstra PD kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Secara regulasi Renstra PD mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan mengedepankan nilai strategis berupa konsistensi, akuntabilitas, partisipasi, inovasi, dan sinergi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan kewajiban perangkat daerah untuk menyusun Renstra sebagai penjabaran RPJMD dan dasar penyusunan RKPD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, mengatur tahapan, substansi minimal, dan mekanisme verifikasi oleh Bappeda. Sedangkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, menegaskan kesinambungan perencanaan lima tahunan dan sinkronisasi Renstra PD dengan RPJMD dan RPJPN. Sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dengan telah dilantiknya Kepala Daerah periode 2025-2029, maka Pemerintah Kota Solok berkewajiban untuk menyusun RPJMD Kota Solok 2025-2029. Oleh sebab itu, maka seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Solok juga berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Solok. Penyusunan rancangan awal Renstra PD secara bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan kualitas perencanaan pembangunan perangkat daerah akan lebih terarah dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Solok 2025-2029 yaitu “Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani”. Nilai strategis Renstra PD mencakup:

1. **Konsistensi dan Kesenambungan** menjamin keselarasan program dan kebijakan OPD dengan visi, misi, dan target RPJMD Kota Solok.
2. **Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja** menjadi tolok ukur evaluasi capaian kinerja tahunan melalui indikator kinerja yang jelas dan terukur.
3. **Partisipasi dan Inklusivitas** mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perumusan strategi dan program, sehingga rancangan Renstra lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
4. **Inovasi dan Adaptabilitas** mendorong pengembangan solusi digital baru serta adaptasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.
5. **Sinergi dan Terpadu** mewujudkan koordinasi lintas perangkat daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam pelaksanaan program, agar sumber daya lebih optimal.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang kemudian disingkat dengan Renstra Dinas PUPR Kota Solok Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1401);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044;
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Solok Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas PUPR Kota Solok Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan, program, dan kegiatan strategis di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang dan sektor pertanahan, yang sesuai dengan kewenangan Dinas PUPR.
2. Menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dapat diukur dan dievaluasi secara periodik guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja organisasi.
3. Mewujudkan integrasi dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan sektoral yang menjadi kewenangan Dinas PUPR.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas PUPR adalah:

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas PUPR sehingga pelaksanaan pembangunan dapat diselenggarakan secara berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.

3. Mendorong sinergi dan keterpaduan kebijakan sektoral, baik dalam lingkup internal perangkat daerah maupun dengan instansi vertikal, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pertanahan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah melalui perencanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome).
5. Menjadi dasar evaluasi kinerja dan pengukuran capaian penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pertanahan, baik dari sisi pelayanan kepada masyarakat maupun pembangunan infrastruktur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renstra Dinas PUPR Kota Solok Tahun 2025-2029 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renstra PD, fungsi dan proses penyusunannya serta keterkaitan Renstra PD dengan dokumen daerah/pusat lainnya. Pada bab Pendahuluan ini juga diuraikan tentang landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra PD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab 2 memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas permasalahan, hambatan-hambatan utama, dan isu strategis yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat daerah selama 5 tahun ke depan beserta indikator-indikator kinerjanya.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup, diuraikan secara ringkas kesimpulan, kaidah pelaksanaan Renstra PD serta pengendalian dan evaluasi Renstra PD agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara selaras dan terukur.

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok, yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PUPR Kota Solok, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, Dinas PUPR mempunyai tugas membantu Wali Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Berikut diuraikan gambaran umum mengenai Dinas PUPR Kota Solok:

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas PUPR Kota Solok merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berikut penjabaran mengenai tugas dan fungsi Dinas PUPR Kota Solok serta unit organisasi di dalamnya:

Dinas PUPR Kota Solok mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan di bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas PUPR Kota Solok menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas PUPR dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat;
2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Bidang Bina Marga;
4. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
5. Bidang Penatan Ruang dan Pertanahan; dan
6. UPTD.

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Solok dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah. Uraian tugas jabatan struktural Dinas PUPR adalah sebagai berikut:

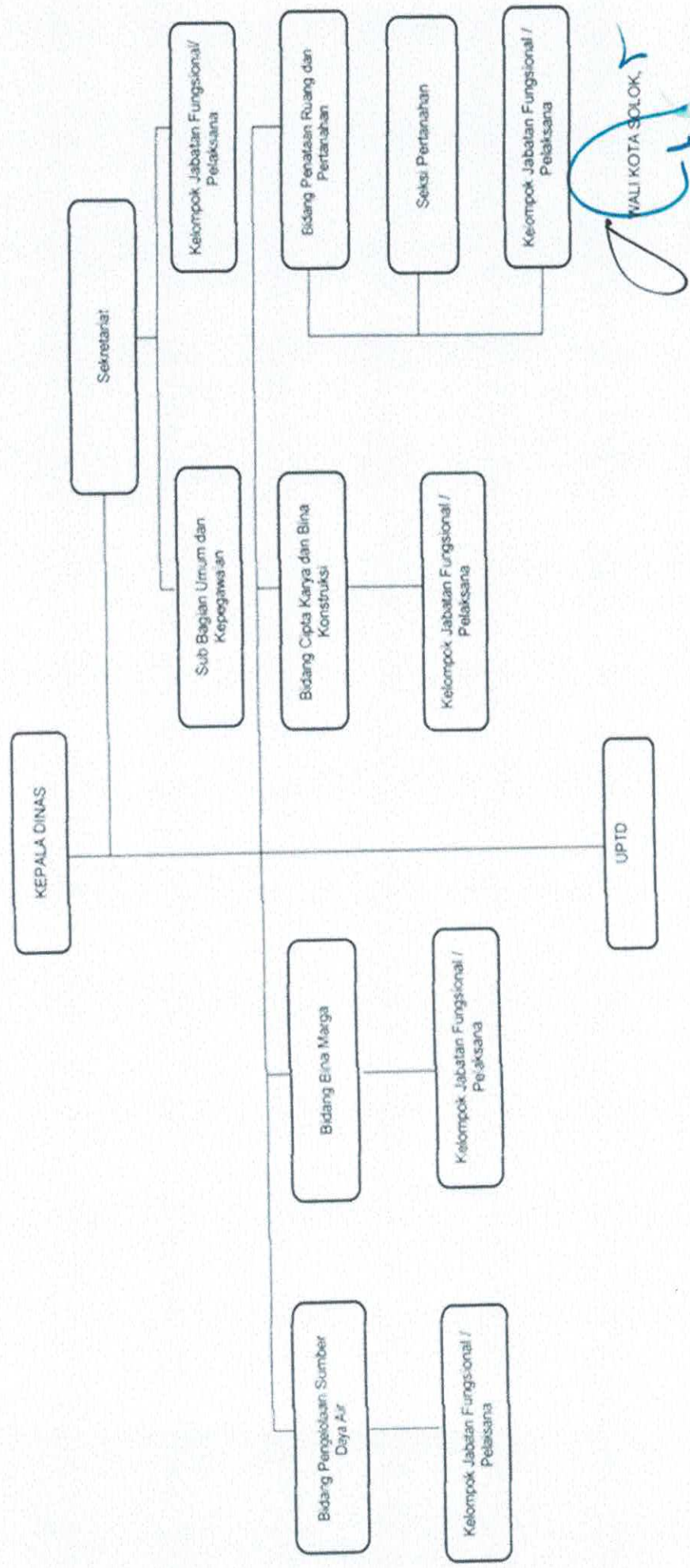
1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/aset, administrasi kepegawaian, perencanaan, program, kegiatan, akuntansi dan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- c. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja dinas;
- d. Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran dinas;
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- f. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas;
- i. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan rencana aksi reformasi birokrasi, dan laporan pertanggungjawaban dinas;
- j. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
- k. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Solok berdasarkan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
- b. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas;
- d. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan pegawai;
- e. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- f. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Bidang pengelolaan sumber daya air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, bidang pengelolaan sumber daya air mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air: dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Bina Marga

Bidang bina marga mempunyai tugas penyiapan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga sesuai ketentuan perundangan. Dalam melaksanakan tugas, bidang bina marga mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
 - b. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian;
 - c. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan penerangan jalan umum;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
- Bidang cipta karya dan bina mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya dan bina konstruksi sesuai dengan ketentuan perundangan. Dalam melaksanakan tugas, bidang cipta karya dan bina konstruksi mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah;
 - b. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
 - d. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan bina konstruksi;
 - e. Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha bina konstruksi;
 - f. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan bina konstruksi;
 - g. Pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan bina konstruksi tingkat daerah dan asosiasi;
 - h. Peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
 - i. Pembangunan infrastruktur persampahan;
 - j. Pelaksanaan pengelolaan, verifikasi dan rekomendasi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - k. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
 - l. Pemfasilitasian pemberian izin konstruksi nasional; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
- Bidang penataan ruang dan pertanahan mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan ruang dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dalam melaksanakan tugas, bidang penataan ruang dan pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis terkait penataan ruang dan pertanahan;
- b. Pengoordinasian program kerja pada bidang penataan ruang dan pertanahan;
- c. Pengoordinasian kegiatan pemanfaatan ruang dan pertanahan;
- d. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada bidang penataan ruang dan pertanahan;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengaturan dan pembinaan tata ruang;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemetaan wilayah;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan penatausahaan pertanahan;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan tanah;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan penegasan batas daerah dan kelurahan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dibantu oleh Seksi Pertanahan. Seksi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan di bidang pertanahan. Dalam melaksanakan tugas, seksi pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan analisis dan pengkajian dalam rangka perumusan alternatif kebijakan dan penyelesaian pengadaan tanah untuk rencana lokasi pembangunan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan tanah;
- c. Penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah;
- d. Pemfasilitasian penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh perangkat daerah yang membutuhkan tanah;
- e. Pelaksanaan perencanaan pengadaan tanah;
- f. Pemfasilitasian penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tanah fasilitas sosial;
- g. Pelaksanaan analisis dan pengkajian dalam rangka perumusan alternatif kebijakan dan penyelesaian pensertifikatan aset pemerintah daerah;
- h. Pemverifikasian kelengkapan dan kebenaran data dan dokumen pensertifikatan tanah pemerintah daerah;
- i. Pendataan dan pengidentifikasian tanah pemerintah daerah yang belum dan akan disertifikatkan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya dalam rangka pensertifikatan tanah aset daerah;

- k. Pelaksanaan survey dan pengukuran lapangan, pengumpulan data dan informasi tentang pensertifikatan tanah aset daerah;
- l. Pelaksanaan analisis dan pengkajian dalam rangka perumusan alternatif kebijakan dan penyelesaian permasalahan sengketa pertanahan;
- m. Pelayanan dan pemfasilitasian pengaduan masyarakat tentang sengketa dan permasalahan pertanahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan kantor pertanahan dan instansi terkait dalam rangka penyelesaian sengketa pertanahan;
- o. Pelaksanaan inventarisasi, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah;
- p. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah tanah ulayat; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. UPTD

UPTD dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas. Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas PUPR didukung oleh 82 orang pegawai, yang terdiri dari ASN dan Non ASN, sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia menurut Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	ASN (PNS dan PPPK)	31	20	51
2	Non ASN	16	15	31
	JUMLAH	47	35	82

Sumber: Dinas PUPR Kota Solok, 2025

Sebagaimana dilihat pada tabel di atas, komposisi pegawai Dinas PUPR Kota Solok sudah didominasi oleh ASN sebesar 62,20%. Sesuai amanat undang-undang, kedepannya pegawai Non-ASN akan diangkat menjadi pegawai ASN melalui jalur P3K Paruh Waktu, sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan dilakukannya pengangkatan pegawai ASN tersebut, diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja pelayanan Dinas menjadi lebih baik lagi.

Dari sisi pendidikannya, dapat dilihat bahwa pegawai Dinas PUPR Kota Solok sudah memiliki SDM yang cukup memadai (pendidikan tinggi). Walaupun demikian, masih terdapat pegawai yang berlatarbelakang pendidikan lebih rendah yaitu: SMA, SMP,

dan SD, sebagaimana pada tabel 2.2 di bawah. Untuk mendapatkan SDM dengan kualitas yang merata, maka Dinas PUPR Kota Solok perlu melakukan upaya peningkatan SDM Pegawainya dengan menyediakan akses pendidikan dan pelatihan yang sesuai, merata, dan secara berkala.

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		ASN	NON ASN	
1	S3	0	0	0
2	S2	14	1	15
3	S1	27	13	40
4	D3	2	0	2
4	SMA	8	15	23
5	SMP	0	1	1
6	SD	0	1	1
	JUMLAH	51	31	82

Sumber: Dinas PUPR Kota Solok 2025

Tabel 2.3 memperlihatkan komposisi sumber daya manusia dinas PUPR berdasarkan Jabatan.

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Status Kepegawaian		Jumlah
		ASN	Non ASN	
1	Kepala	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1	-	1
	Jabatan Fungsional Tertentu	1	-	1
	Fungsional Umum/Pelaksana/Staf	7	7	14
3	Kabid. Pengelolaan Sumber Daya Air	1	-	1
	Jabatan Fungsional Tertentu	3	-	3
	Fungsional Umum/Pelaksana/Staf	6	4	10
4	Kabid. Bina Marga	1	-	1
	Jabatan Fungsional Tertentu	3	-	3
	Fungsional Umum/Pelaksana/Staf	7	6	13
5	Kabid. Cipta Karya dan Bina Konstruksi	1	-	1
	Jabatan Fungsional Tertentu	4	-	4
	Fungsional Umum/Pelaksana/Staf	5	8	13
6	Kabid Tata Ruang dan Pertanahan	1	-	1
	Jabatan Fungsional Tertentu	4	-	3
	Fungsional Umum/Pelaksana/Staf	6	6	12
	JUMLAH	51	31	82

Sumber: Dinas PUPR Kota Solok 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa persebaran pegawai pada Dinas PUPR sudah cukup merata dan sesuai dengan kebutuhan.

Namun, yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan pegawai yang berkompeten agar kinerja Dinas dapat terus digenjut.

2. Sarana dan Prasarana

Dinas PUPR Kota Solok sekarang ini belum mempunyai kantor yang representatif, karena masih memanfaatkan bangunan eks-gedung Dinas PUPR Propinsi di Jalan Proklamasi No 1 Kota Solok. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai dengan luas keseluruhan 974m² (termasuk gudang dan labor), sedangkan yang dimanfaatkan oleh Dinas PUPR Kota Solok adalah 846m². Adapun sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh Dinas PUPR Kota Solok untuk menjalankan tugas yaitu seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Gambaran Sarana dan Prasarana Dinas PUPR dan Kondisinya

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
	Peralatan dan Mesin		
I	Alat-alat Besar:		
1	Asphalt Mixing Plant	1	Baik
2	Tandam Roller	1	Baik
3	Stamper	1	Baik
4	Concrete Cutter	1	Baik
5	Sumersible Pump	1	Baik
II	Alat-alat Angkutan :		
1	Minibus	5	Baik
2	Pick Up	3	Baik
3	Sepeda Motor	32	Baik
4	Mobil Tinja	2	Baik
III	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur		
1	Mesin Pelubang (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	1	Baik
2	Global Positioning System	3	Baik
3	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	6	Baik
IV	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		
1	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	Baik
2	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	Baik
3	Mesin Absen (Time Recorder)	1	Baik
4	Lemari Besi/Metal	13	Baik
5	Lemari Kayu	21	Baik
6	Rak Besi	1	Baik
7	Filing Cabinet Besi	13	Baik
8	Brandkas	1	Baik
9	Tempat Menyimpan Gambar	3	Baik
10	Lemari Kaca	23	Baik
11	CCTV	1	Baik
12	White Board	2	Baik
13	LCD Projector/Infocus	4	Baik
14	Papan Pengumuman	88	Baik

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
15	Kursi Besi/Metal	24	Baik
16	Meja Rapat	2	Baik
17	Meja 1/2 Biro	44	Baik
18	Meja 1/2 Biro	1	Baik
19	Kursi Putar	4	Baik
20	Bangku Tunggu	2	Baik
21	Sofa	1	Baik
22	Lemari Es	1	Baik
23	A.C. Window	14	Baik
24	A.C. Split	8	Baik
25	Televisi	1	Baik
26	Wireless	1	Baik
27	Camera Video	3	Baik
28	Dispenser	4	Baik
29	Handy Cam	1	Baik
30	Gordyin/Kray	1	Baik
31	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Baik
32	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	Baik
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16	Baik
V	Alat-Alat Studio dan Komunikasi		
1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	11	Baik
2	Digital Audio Storage System	1	Baik
3	Alat Studio Lainnya	1	Baik
4	Pesawat Telephone	2	Baik
5	Facsimile	1	Baik
6	Genset	1	Baik
VI	Alat-Alat Laboratorium		
1	Drill Machine	2	Baik
2	Test Press/Strenght Test	1	Baik
3	Concreta Mixer/Penumbuk Beton	1	Baik
4	Vibrating Unit	1	Baik
5	Abration Machine	1	Baik
6	Alat Pemeriksa Semen	2	Baik
7	Alat Pemeriksa Agrigat	1	Baik
8	Slump Test Set	1	Baik
9	Concrette Hammer Set	2	Baik
10	Pentrometer	1	Baik
11	Sand Equivalent	1	Baik
12	Cbr Lab. Set Cl.284	2	Baik
13	Sample Spliter Set Cl.284	1	Baik
14	Drying Oven	1	Baik
15	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	1	Baik
16	Timbangan/Neraca	1	Baik
17	Crusible Penyaring	1	Baik
18	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	2	Baik

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
19	Elektrik Thermometer	1	Baik
20	Alat Gerinda	1	Baik
21	Scuber Unit	9	Baik
22	Platform Scale (General Laboratory Tool)	1	Baik
23	alat peraga praktek sekolah bidang studi : bahasa indonesia lainnya (dst)	2	Baik
24	Gelas Ukur	2	Baik
25	Cawan Alumunium	4	Baik
26	Silinder Materi	1	Baik
27	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	1	Baik
28	Soil test	1	Baik
VII	Komputer		
1	P.C Unit	26	Baik
2	Lap Top	21	Baik
3	peralatan mainframe lainnya (dst)	1	Baik
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	28	Baik
5	External/ Portable Hardisk	5	Baik
6	Acces Point	1	Baik
7	Routerboard Mikrotik RB 2011	1	Baik
VIII	ALAT PENGEBORAN		
1	Sondir	1	Baik

Sumber: Dinas PUPR Kota Solok, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas PUPR Kota Solok menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanahan. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan peranan penting didalam pengembangan wilayah karena pada urusan ini teremban tugas pembangunan infrastruktur daerah dan penyelenggaraan penataan ruang wilayah. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan didalam beberapa program yaitu: Pengelolaan sumberdaya air (pengamanan wilayah sungai dan pengelolaan Irigasi), Pengelolaan sistem penyediaan air minum, Pengelolaan sistem pengolahan air limbah, Pengelolaan sistem drainase, Penataan bangunan gedung, Penataan gedung dan lingkungannya, Penyelenggaraan jalan, Pengembangan jasa konstruksi, dan Penyelenggaraan penataan ruang. Sedangkan Urusan pertanahan pada dasarnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/BPN namun dilimpahkan sebagian kewenangannya ke pemerintah daerah agar penyelenggaraan urusan pertanahan dapat dilakukan secara terintegrasi sehingga tidak timbul permasalahan-permasalahan didalam pengelolaan di bidang pertanahan, baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.

Perkembangan capaian penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanahan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan PUPR dan Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio capaian tahun												
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025								
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																											
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kab/Kota (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76	2,76	2,76	2,76	26,98	2,76	2,76	2,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	-	-	-	82,00	83,00	85,00	86,00	89,00	73,70	74,16	91,74	91,77	91,77	74,16	91,74	91,77	107,93	89,88	89,35	107,93	106,71	-	-	-	-	-
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	-	-	-	86,65	86,90	86,95	87,00	87,05	97,59	97,80	97,82	97,83	97,83	97,80	97,82	97,83	112,50	112,63	112,54	112,50	112,45	-	-	-	-	-
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	-	-	-	85,31	85,41	85,51	85,61	85,71	72,68	92,59	95,83	95,84	95,84	92,59	95,83	95,84	112,07	85,20	108,41	112,07	111,95	-	-	-	-	-

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio capaian tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
5	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	97,50	98,63	97,44	97,50	98,63	97,44	-	
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	-	-	-	78,40	79,90	81,40	82,90	84,40	82,56	78,87	78,57	75,50	-	98,71	96,52	91,07	-	
7	Persentase tenaga operator/ teknisi/ analis operator yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	100,00	2,07	-	-	100,00	2,07	-	
8	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	99,49	-	100,00	100,00	99,49	-	
URUSAN PERTANAHAN																			
1	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	40	
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	
3	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	100	100	-	

Indikator-indikator yang dicantumkan di dalam tabel 2.3 di atas terdiri dari 2 kategori; 1) Indikator Kinerja Program yang menjadi target kinerja pada RPJMD Kota Solok tahun 2021-2026 yang lalu, dan 2) Indikator kinerja kunci (IKK), yang terdapat pada Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang disingkat dengan LPPD. Berbeda dengan Indikator Kinerja Program, sebagian dari IKK tidak menjadi target kinerja Perangkat Daerah. Dengan begitu, Perangkat daerah tidak menetapkan target terhadap IKK tersebut, seperti pada indikator “Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kab/Kota”, dan sebagian besar dari indikator pada urusan pertanahan.

Indikator “Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota” memberikan gambaran seberapa besar dampak keberadaan infrastruktur pengendali banjir pada suatu wilayah sungai untuk melindungi kawasan permukiman rawan banjir didalam suatu wilayah Kabupaten/Kota. terdapat perbedaan data yang signifikan antara data realisasi capaian tahun 2024 dengan data pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sebagai akibat dari telah dilakukannya penyesuaian database kawasan rawan banjir di Kota Solok berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh dinas terkait. Namun demikian, perubahan data tersebut tidak menafikan realitas bahwa pembangunan laydam/penahan tebing sungai yang selama ini dilakukan belum cukup mampu untuk menahan terjadinya luapan banjir di kawasan permukiman di Kota Solok. Permasalahan didalam pengendalian banjir di Kota Solok adalah luasnya kawasan permukiman yang berlokasi di sepanjang jalur sungai besar seperti Batang lembang dan Batang gawan, yang merupakan dua sungai yang paling sering meluap pada saat musim hujan. Selain itu, adanya perbedaan kewenangan penanganan beberapa sungai di Kota Solok juga menjadi hambatan didalam penanganan banjir di Kota Solok, seperti sungai Batang Lembang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Batang gawan yang merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi. Faktor lain yang menjadi kendala didalam penanganan banjir di Kota Solok adalah anggaran daerah yang tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan infrastruktur pengendali banjir secara masif. Oleh sebab itu, upaya pemerintah daerah agar Kota Solok menjadi daerah bebas banjir harus terus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan serta meningkatkan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi.

Indikator “Persentase luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi” menggambarkan tentang seberapa luas cakupan layanan air irigasi yang mampu dialiri oleh jaringan irigasi yang telah dibangun pada daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota. Perkembangan pengelolaan irigasi di Kota Solok dari tahun ke tahun terlihat cukup meningkat bahkan

pada akhir-akhir tahun rencana, realisasi capaiannya mampu melewati target yang ditetapkan. Namun demikian, pencapaian tersebut masih belum mampu meliputi 100% kebutuhan masyarakat yang bergerak pada sektor pertanian, dimana masih ada petak sawah yang belum mendapat pasokan air yang memadai melalui saluran tersier dari jaringan irigasi yang sudah tersedia. Beberapa faktor penyebabnya adalah masih adanya saluran irigasi yang berkondisi tidak baik/rusak, dan sistem pemakaian air irigasi yang tidak dikelola dengan baik oleh kelompok tani/petani pemakai air. Ketersediaan sumber air juga menjadi salah satu faktor penyebabnya karena selama ini pasokan air irigasi hanya bergantung kepada keberadaan sungai disekitarnya. Beberapa daerah di Kota Solok malahan masih menggunakan sistem bersawah tadah hujan. Pencarian alternatif sumber air baru dan peningkatan pelayanan jaringan irigasi harus terus dilaksanakan agar menjamin ketersediaan air irigasi yang memadai di Kota Solok.

Terkait dengan penyediaan sistem air bersih, cakupan pelayanan air minum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan sampai melebihi target yang ditetapkan di dalam RPJMD Kota Solok. Namun demikian, Pemerintah perlu memperhatikan tantangan penyediaan air bersih di masa mendatang dimana tren peningkatan jumlah penduduk dan jumlah hunian sudah tidak sebanding dengan kapasitas sumber air baku dan kapasitas jaringan air bersih yang tersedia. Ketersediaan air baku dari tahun ke tahun sudah mengalami stagnansi akibat tidak ditemukannya sumber air baru yang dapat menambah pasokan air bersih. Di sisi lain, pemanfaatan sumber air non perpipaan oleh masyarakat, seperti air sumur, juga masih ditemukan sebagai upaya masyarakat didalam memenuhi kebutuhannya terhadap air bersih. Berdasarkan tabel 2.3 di atas, baru 86,60% rumahtangga di Kota Solok yang sudah memanfaatkan air minum jaringan perpipaan yang dikelola Perumda Air Minum. Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan 100% rumah tangga dapat teraliri air bersih jaringan perpipaan, sebagaimana target akhir indonesia emas 2045.

Sama halnya yang terjadi dengan pelayanan sistem air limbah domestik. Perkembangan cakupan pelayanan pengolahan air limbah semakin membaik karena telah terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah dari 85,21% pada tahun 2020 menjadi 95,84% pada tahun 2024. Pencapaian tersebut bahkan melebihi target yang ditetapkan di dalam RPJMD Kota Solok periode yang lalu. Namun demikian, masih terdapat hampir 5% dari penduduk Kota Solok yang tidak memiliki sanitasi yang layak yang nantinya berpotensi mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat sekitarnya. Edukasi secara terus menerus kepada masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang baik bagi keluarga perlu terus dilaksanakan agar setiap rumah tangga dapat

menyediakan sanitasi aman dan berkelanjutan secara mandiri. Selain itu, diperlukan komitmen yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk secara bersama-sama melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sanitasi kota secara terintegrasi. Pemerintah harus lebih fokus dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait sistem pengolahan air limbah yang layak dan terus berusaha meningkatkannya menuju sistem pengolahan air limbah aman yaitu dengan mendorong masyarakat untuk melakukan sedot tinja rutin (3-4 tahun sekali). Hal ini perlu terus dilakukan karena sampai tahun 2024 yang lalu persentase rumahtangga dengan sanitasi aman masih sangat rendah yaitu 12,99%.

Tingkat kepatuhan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan gambaran seberapa besar komitmen masyarakat untuk mengikuti aturan dan kebijakan pemerintah dalam mendirikan bangunan sesuai peruntukannya. Melihat tabel 2.3 di atas, tergambar bahwa pencapaiannya masih belum mampu mencapai target 100%. Hal ini dapat diartikan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi persyaratan pendirian bangunan gedung sesuai PBG yang diterbitkan. Dengan demikian, Pemerintah perlu untuk terus melakukan sosialisasi, edukasi dan pengawasan berkala hingga penindakan tegas kepada masyarakat dalam rangka mengawal terlaksananya perencanaan tata ruang yang berkelanjutan.

Indikator kemantapan jalan merupakan gambaran seberapa baik kondisi jalan. Dari tabel 2.3 dapat tergambar bahwa telah terjadi kecenderungan penurunan kondisi jalan pada 3 tahun belakangan hingga pencapaiannya menjadi dibawah target yang ditetapkan. Hal ini diakibatkan karena pada tahun 2022 yang lalu terjadi penambahan ruas-ruas jalan baru dan koreksi panjang jalan pada beberapa ruas jalan di Kota Solok. Namun demikian, kondisi jalan di Kota Solok masih mampu memberikan layanan prima kepada penggunaannya.

Terdapat dua indikator yang menggambarkan capaian kinerja program penyelenggaraan jasa konstruksi, yaitu indikator “Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi” dan “Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi”. Secara data, jumlah tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kota Solok masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dunia konstruksi. Upaya pelatihan, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya perlu untuk dilaksanakan agar pekerjaan konstruksi dapat diselenggarakan oleh tenaga-tenaga handal dan mumpuni. Sedangkan pada indikator kedua, tergambar bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan K3 pada setiap proyek masih perlu terus ditingkatkan. Prinsip-prinsip SMK3 harus terus dipertahankan agar tidak ada lagi terjadi kecelakaan konstruksi.

Untuk urusan pertanahan, penyelenggaraannya dari tahun ke tahun sudah semakin membaik. Untuk penanganan sengketa tanah

garapan yang dilakukan melalui mediasi terus mengalami peningkatan. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan sudah terlaksana sesuai aturan karena ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat daerah terkait.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR umumnya meliputi masyarakat umum, desa/kelurahan, dan kecamatan, serta asosiasi pekerja. Kelompok sasaran ini mencakup semua pihak yang akan menerima manfaat dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pertanahan, seperti pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan perencanaan tata ruang serta pertanahan. Berikut Kelompok sasaran layanan Dinas PUPR Kota Solok:

1. Masyarakat:
Semua warga negara yang akan mendapatkan manfaat dari infrastruktur dasar seperti jalan, air, sanitasi, dan perumahan. Selain itu, Dinas PUPR juga memediasi penyelesaian permasalahan tanah yang terjadi antar kalangan masyarakat maupun antara masyarakat dengan Pemerintah.
2. Desa/Kelurahan:
Unit pemerintahan terkecil yang menerima layanan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana di wilayahnya.
3. Kecamatan:
Tingkat pemerintahan yang melayani lebih luas, yang berinteraksi dengan dinas untuk koordinasi kegiatan di wilayahnya.
4. Asosiasi Pekerja:
Kelompok yang terlibat dalam sektor konstruksi dan pekerjaan umum, yang mungkin mendapat manfaat dari regulasi, pelatihan, dan kesempatan kerja yang diciptakan oleh dinas.
5. Sektor swasta dan publik:
Pelaku ekonomi dan institusi lain yang membutuhkan infrastruktur dan tata ruang yang memadai untuk kegiatan operasionalnya, misalnya pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, dan lainnya.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas PUPR Kota Solok menghadapi berbagai permasalahan sebagaimana yang telah disampaikan pada subbab 2.1.3 sebelumnya. Untuk penjabarannya, diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas PUPR

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pengendalian Banjir Di Kota Solok	Infrastruktur pengendali banjir belum optimal	Luasnya kawasan permukiman rawan banjir yang berlokasi di sepanjang jalur sungai Batang Lembang dan Sungai Batang gawan,
			Kewenangan penanganan sungai Batang Lembang dan Batang gawan berada dibawah Pemerintah Pusat.
			Anggaran daerah yang tidak memadai.
2	Belum Optimalnya Cakupan Layanan Irigasi	Masih ada petak sawah yang belum mendapat pasokan air yang memadai melalui saluran tersier dari jaringan irigasi yang sudah tersedia	Masih adanya saluran irigasi berkondisi tidak baik/rusak.
			Sistem pengelolaan pemakaian air irigasi yang belum terlaksana dengan baik.
			Masih kurangnya ketersediaan sumber air baku.
3	Belum Optimalnya Akses Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	Keterbatasan akses rumahtangga terhadap air minum layak, serta pelayanan penyediaan air minum tidak optimal	Keterbatasan sumber air, kondisi SPAM di Kota Solok sudah yang sudah mencapai umur pemakaian optimal, dan kondisi jaringan perpipaan terpasang di seluruh Kota Solok yang sudah perlu direhabilitasi/ ditingkatkan.
			Jaringan perpipaan yang sudah tidak layak (melampaui umur ekonomis), jaringan perpipaan yang dikelola oleh Pokmas belum melakukan pengolahan air sesuai dengan standar kesehatan, dan belum optimalnya pemantauan kualitas air pada sistem individual (bukan jaringan perpipaan).
			Belum semua pelanggan air minum mendapat aliran air 24 jam/hari selama 7 hari/minggu akibat faktor debit air baku dari sumber air permukaan yang tidak stabil disebabkan oleh faktor cuaca.
			Akses jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah Kota Solok terutama wilayah yang memiliki topografi dengan klasifikasi lereng di atas 25% sehingga membutuhkan infrastruktur dengan biaya yang cukup tinggi (high cost).

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Menurunnya Tingkat Kemantapan Jalan	Terjadinya penurunan kondisi jalan berkondisi baik dan sedang.	Keterbatasan anggaran untuk penanganan jalan (Pembangunan/rehabilitasi/operasi dan pemeliharaan jalan.
5	Kurangnya SDM yang kompeten	Ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten masih belum mencukupi.	Keterbatasan anggaran untuk melakukan pelatihan, bimtek dan pembinaan lainnya.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan di masa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis daerah, menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra, dapat disimpulkan dari permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional), dan potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil pemetaan permasalahan, sebagaimana terdapat pada tabel 2.6, rekapitulasi potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas PUPR, dan pertimbangan terhadap isu-isu global, nasional, dan regional, sebagaimana pada tabel 2.7, didapat kesimpulan bahwa isu strategis yang dihadapi oleh Dinas PUPR adalah **pada masih rendahnya kualitas lingkungan hidup dan ketersediaan infrastruktur perkotaan yang belum memadai**. Rendahnya kualitas lingkungan hidup dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak kepada produktifitas masyarakat dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Di sisi lain, Infrastruktur perkotaan yang tidak memadai, seperti air bersih, sanitasi, dan jalan, secara langsung mempengaruhi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan masalah lingkungan baru di kemudian hari.

Tabel 2.7
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas PUPR

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL (4)	NASIONAL (5)	REGIONAL (6)	
(1) Peningkatan layanan Infrastruktur Perkotaan (air minum, sanitasi, jalan, layanan sosial dan layanan ekonomi, dll) yang mampu menjadi penopang kegiatan ekonomi skala regional	(2) Belum Optimalnya Akses Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	(3) Penurunan kualitas dan kuantitas air	(4) Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang	(5) Daya tampung air diperkirakan akan terus menurun mengakibatkan krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Saat ini 82 persen dari 550 sungai di Indonesia berstatus tercemar	(6) Permasalahan air minum di Sumatera Barat adalah keterbatasan akses rumah tangga terhadap air minum layak, serta pelayanan penyediaan air minum tidak optimal	(7) Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup
			Sekitar 70% dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar	Sekitar 70% dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar		
	Belum Optimalnya Cakupan Layanan Irigasi		Dampak perubahan iklim global menyebabkan terjadinya peningkatan kerugian terhadap produksi sektor pertanian dan meningkatkan biaya ekonomi yang signifikan pada sektor terdampak.	Kualitas air dan tanah diperkirakan turun akibat upaya penanganan limbah dan sampah yang tidak optimal saat aktivitas perekonomian terus meningkat	Stok infrastruktur masih terbatas, masih cukup banyak wilayah di Sumatera yang masih mengalami kesenjangan infrastruktur dan memiliki infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	
			Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan yang mengancam masa depan bumi dan manusia		Degradasi lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, abrasi dan penurunan luas lahan pertanian pangan karena	

POTENSI DAERAH (1)	PERMASALAHAN (2)	ISU KLHS (3)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH (7)
			GLOBAL (4)	NASIONAL (5)	REGIONAL (6)	
			yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sekitar 3,5 miliar orang di dunia (WHO & UNICEF, 2023) masih belum memiliki akses ke sanitasi yang dikelola dengan aman. Banyak negara berkembang belum memiliki sistem pengelolaan air limbah terpadu, seperti jaringan perpipaan dan instalasi pengolahan limbah, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan kumuh perkotaan.	Beban pencemaran limbah domestik terus meningkat mencapai 4,7 juta ton BOD per tahun dan berisiko mencemari badan air tanpa adanya pembangunan IPAL, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memadai	alih fungsi lahan serta pertambahan	
	Masih Rendahnya Capaian Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	-		Hanya sebagian kecil rumah tangga mendapatkan akses terhadap pengelolaan sanitasi aman akibat persebaran dan pemanfaatan sarana dan prasarana sanitasi masih belum optimal dan belum sesuai dengan standar SNI.		
			Sanitasi yang buruk berkontribusi terhadap tingginya angka diare, kolera, tifus, dan penyakit parasit usus. WHO memperkirakan sanitasi yang tidak layak menyebabkan sekitar 432.000 kematian setiap tahun akibat diare, sebagian besar di negara berpenghasilan rendah		Faktor kesehatan lingkungan, dimana masih terdapat rumah tangga yang belum mempunyai akses terhadap jamban sehat dan air bersih sehingga meningkatkan risiko timbulnya penyakit dan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak (terkait prevalensi stunting)	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kondisi geografis Kota Solok yang sangat strategis sebagai akses utama wilayah timur Sumatera Barat	Belum Optimalnya Pengendalian Banjir Di Kota Solok Menurunnya Tingkat Kemantapan Jalan	-	Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrim dan bencana.	Meningkatnya potensi bencana	Permasalahan akses sanitasi di Sumatera Barat adalah karena kurangnya kesadaran peran, partisipasi dan permintaan masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman yang berkelanjutan, belum optimalnya pemisahan regulator, operator dan pengawasan pengelolaan sanitasi, serta pendanaan sektor sanitasi yang rendah. Kerusakan ekosistem hutan yang masif terjadi di berbagai daerah di Sumatera Barat	Infrastruktur perkotaan yang masih belum memadai
			dan menengah.		Masih terjadinya ketimpangan ekonomi antara wilayah barat dan timur Sumatera dimana Kawasan Sumatera bagian timur memiliki konektivitas antar wilayah relatif lebih baik saat ini dalam pengembangan infrastruktur transportasi pembangunan untuk masa datang	

POTENSI DAERAH (1)	PERMASALAHAN (2)	ISU KLHS (3)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH (7)
			GLOBAL (4)	NASIONAL (5)	REGIONAL (6)	
		-	-	-	Salah satu permasalahan yang dihadapi Sumatera Barat terkait pengembangan pariwisata adalah ketersediaan aksesibilitas dan utilitas yang masih terbatas.	
		-	-	-	Salah satu permasalahan pertumbuhan kewirausahaan di Sumatera Barat adalah kurangnya infrastruktur pendukung. Kendala dalam infrastruktur transportasi dan distribusi barang dapat menyulitkan pengusaha lokal untuk memasarkan produk ke pasar yang lebih luas.	
Fungsi Kota sebagai penyedia infrastruktur yang lebih memadai untuk daerah sekitarnya	Ketersediaan sarana prasarana layanan sosial dan ekonomi yang belum memadai	-	Tren penyediaan infrastruktur yang ramah lingkungan dan inklusif.	Tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk didalamnya penyediaan infrastruktur hijau.		
IPM Kota Solok yang tinggi	Kurangnya SDM sektor konstruksi yang kompeten	-	Kurangnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Tingkat serapan tenaga kerja masih rendah		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar Dinas PUPR mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan akan dapat diketahui pula apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran. Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas PUPR dalam jangka kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Tujuan Dinas PUPR disinkronkan dengan tugas pokok dan fungsi, yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut. Selanjutnya, Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas PUPR dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah disusun dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Kalimat kondisi;
2. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan
4. Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Solok, maka Perangkat Daerah harus merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra, tujuan dirumuskan dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah, dan sasaran RPJMD Kota Solok tahun 2025-2029. Bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR, maka Dinas PUPR memiliki *mandatory* untuk mendukung secara penuh terhadap misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kota Solok, yaitu pada **misi 7: Mewujudkan tata kelola lingkungan dan infrastruktur kota yang berkeadilan, dan berorientasi masa depan; ramah anak, ramah lansia, ramah disabilitas**, yang diturunkan pada **Tujuan 7.1: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur** dengan Sasaran yang akan diwujudkan yaitu pada **Sasaran 7.1.2: Meningkatkan**

Kualitas Permukiman. Untuk mewujudkannya, maka Dinas PUPR telah menetapkan tujuannya yaitu:

**“MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP
INFRASTRUKTUR BERKUALITAS”**

Kemudian, untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan 5 (lima) sasaran Renstra Dinas PUPR tahun 2025-2029 beserta tolok ukur pencapaiannya, sebagaimana tabel 3.1 di bawah.

Tabel 3.1
Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas PUPR Kota Solok Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan (01)	Tujuan (02)	Sasaran (03)	Indikator (04)	Baseline 2024 (05)	Target tahun					Ket (12)	
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)		2030 (11)
1.03.2.10.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
Meningkatnya kualitas permukiman	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air	Indeks Kinerja Infrastruktur ke-PU-an (Indeks)	79,24	80,04	81,51	83,68	86,08	88,39	90,06	
			Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	91,77	91,77	92,01	94,30	95,06	95,60	96,35	
			Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kab/kota	26,98	27,00	36,70	49,61	62,51	75,59	86,56	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70,30	72,35	74,4	76,45	78,50	80,55	82,60	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	82,65	83,00	85,00	85,50	86,00	87,00	88,35	
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Indeks)	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	86,60	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
			Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	95,84	95,90	95,92	96,00	98,00	100,00	100,00	
			Tingkat Kemantapan Jalan kab/kota (%)	75,50	76,00	77,05	78,56	80,52	82,03	83,13	
			Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	73,12	73,50	73,96	74,42	74,88	75,34	75,81	
Meningkatnya kualitas penataan ruang			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW (%)	76,50	76,50	77,00	77,50	78,00	78,50	79,00	

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas PUPR Kota Solok tahun 2025-2029, diperlukan strategi-strategi yang efektif dan sekaligus efisien dimana Dinas PUPR mesti mempertimbangkan pemanfaatan berbagai unsur pendukung/ penunjang lainnya dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kondisi keuangan negara yang saat ini sedang menurun pastinya memberikan dampak sangat besar kepada daerah karena sebagian besar sumber pendanaan daerah merupakan suntikan dari APBN. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Solok, dalam hal ini: Dinas PUPR, harus mencari alternatif pendanaan yang memungkinkan agar upaya pencapaian rencana pembangunan daerah sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap sesuai koridor yang telah ditentukan.

Strategi Dinas PUPR dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas PUPR Kota Solok tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya pengendalian banjir.
2. Meningkatkan cakupan pelayanan irigasi.
3. Meningkatkan cakupan layanan air baku dan air minum perpipaan.
4. Meningkatkan cakupan layanan sistem air limbah.
5. Meningkatkan kinerja jalan dan lalu lintas.
6. Meningkatkan fungsi jaringan drainase perkotaan.
7. Meningkatkan kualitas penataan ruang daerah.
8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah.

Dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia di Kota Solok, maka perlu disusun tahapan-tahapan pelaksanaan strategi Renstra Dinas PUPR Kota Solok selama 5 tahun mendatang. Hal ini bertujuan agar pendistribusian fokus-fokus program prioritas Dinas PUPR pada setiap tahun rencana dapat sejalan dengan ketersediaan sumber daya yang ada sehingga nantinya dapat memberikan hasil/dampak yang maksimal bagi terwujudnya tujuan dan sasaran Renstra Dinas PUPR Kota Solok sesuai rencana yang telah ditetapkan. Tabel 3.2 di bawah mengurai tahapan pelaksanaan Renstra Dinas PUPR Kota Solok dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tabel 3.2
 Penahapan Renstra Dinas PUPR Kota Solok Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1) Pemutakhiran basis data dan Penguatan perencanaan sektoral.	(2) Pelaksanaan program prioritas.	(3) Pelaksanaan program prioritas.	(4) Pelaksanaan program prioritas.	(5) Pelaksanaan program prioritas.
Peningkatan koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait.	Peningkatan koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait.	Peningkatan koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait.	Peningkatan koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait.	Peningkatan koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait.
	Peningkatan upaya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program prioritas secara terpadu.	Peningkatan upaya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program prioritas secara terpadu.	Peningkatan upaya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program prioritas secara terpadu.	Peningkatan upaya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program prioritas secara terpadu.
	Evaluasi hasil pelaksanaan program prioritas.	Evaluasi hasil pelaksanaan program prioritas.	Evaluasi hasil pelaksanaan program prioritas.	Evaluasi hasil pelaksanaan program prioritas.

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Tabel 3.3 berikut menguraikan teknik perumusan arah kebijakan Renstra Dinas PUPR tahun 2025-2029:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitas Penataan Ruang	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/ wilayah (Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), standar pelayanan, dan peraturan pendukung lainnya.	Melakukan percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/ wilayah (Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), standar pelayanan, dan peraturan pendukung lainnya.	
		Penyiapan infrastruktur yang berkeadilan (ramah anak, ramah disabilitas dan ramah lansia) serta ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai RTRW dan regulasi pendukung	Melakukan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/ wilayah (Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), standar pelayanan, dan peraturan pendukung lainnya.	
2	Meningkatkan kualitas pemukiman	Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan yang terpadu dan merata.	Meningkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan yang terpadu dan merata.	
3	Meningkatkan cakupan layanan sistem air limbah	Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik	Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik	
		Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengolahan limbah	Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengolahan limbah	
4	Meningkatkan cakupan pelayanan air baku dan air minum perpipaan	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum perpipaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum perpipaan.	
		Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan Air	Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan Air	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket.
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
		Minum.	Minum.	
		Penyediaan infrastruktur air minum aman dan berkelanjutan.	Penyediaan infrastruktur air minum aman dan berkelanjutan.	
5	Meningkatkan kinerja jalan dan lalu lintas	Peningkatan preservasi jalan (rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin/ berkala) dan infrastruktur pendukung.	Peningkatan preservasi jalan (rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin/ berkala) dan infrastruktur pendukung.	
		Pembangunan jalan dan jembatan.	Pembangunan jalan dan jembatan.	

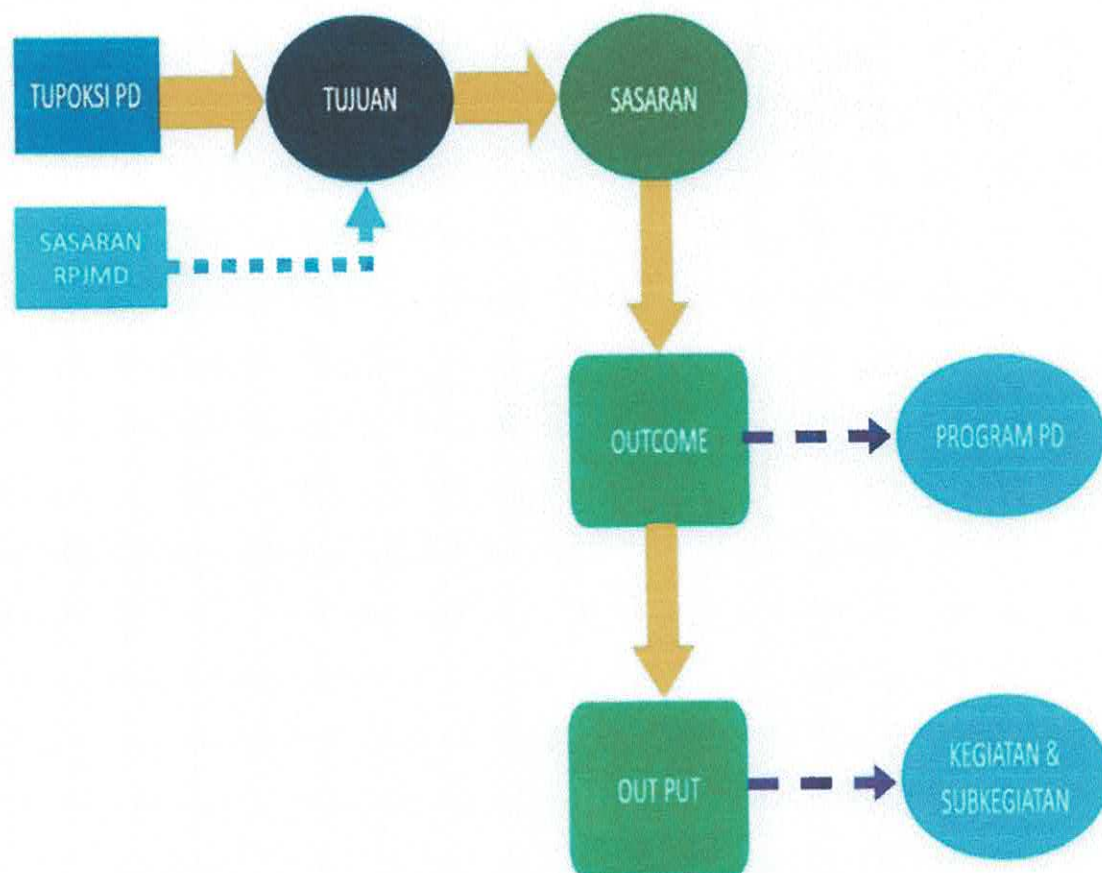
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN
PENDANAAN

Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 beserta pemutakhirannya. Rencana disusun mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas PUPR Kota Solok, sekaligus sebagai pijakan penyusunan Renja Dinas PUPR setiap tahunnya. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD, Program/Kegiatan/Subkegiatan dirumuskan berdasarkan kerangka perumusan pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1

Kerangka perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah



Selanjutnya kerangka ini diturunkan pada teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan Dinas PUPR Kota Solok, sebagaimana tabel berikut:

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS PUPR KOTA SOLOK 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
1.03.2.10.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air			Indeks Kinerja Infrastruktur ke-PU-an (Indeks)		
					Persentase Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (%)		
					Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Kab/Kota (%)		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		Persentase Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Kab/Kota (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.01.0126 - Rehabilitasi Tanggul Sungai	
					Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.02.2.02.0030 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		Persentase fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02.0001 - Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelatihan (Orang)	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Kunjungan Tamu (Laporan)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan	
					Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah		Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	
					Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	
					Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	
					Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	
				Ketersediaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.03.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
		Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Daerah			Perentase Terbukti Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah (%)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1.03.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
		Meningkatnya kualitas sanitasi dan air bersih masyarakat			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%) Persentase Penduduk Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domesdik) Layak Dan Aman (%) Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		Persentase Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Terlindungi Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten/Kota (%)	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi temadap rumah	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Debit)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Debit)	1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengolahan air limbah		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Persentase Penduduk Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak Dan Aman (%)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Tingkat Kematapan Jalan kabupaten/kota (%)	1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		Meningkatnya kinerja jalan dan drainase			Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan		Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
					Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	
					Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)	1.03.06.2.01.0020 - Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Tingkat Kemantapan Jalan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01.0087 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
					Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW (%)		
		Meningkatnya kualitas penataan ruang			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW (%)	1.03.12 - PROGRAM PENYELANGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Pelatihan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
				Persentase Pemohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diproses	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
				Persentase Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
					Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun pada Renstra Dinas PUPR Kota Solok tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Pemerintah Kota Solok dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Solok 2025-2029. Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*). Penyusunan program tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas PUPR untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Setelah menentukan program yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun mendatang, selanjutnya adalah merumuskan dan menentukan kegiatan dan subkegiatan yang sesuai untuk mendukung tercapainya hasil yang diharapkan (*outcome*). Daftar program, kegiatan dan subkegiatan yang dipakai mengacu pada nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta turunan/pemutakhirannya yaitu keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tabel 4.2 di bawah menguraikan teknik merumuskan program kegiatan dan subkegiatan Renstra Dinas PUPR Kota Solok tahun 2025-2029.

Selanjutnya, setelah ditetapkan program kegiatan dan subkegiatan selama periode 2025-2029, maka ditentukan juga target dan pendanaannya untuk setiap tahunnya. Selain itu, sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah antar periode kepemimpinan, maka perlu ditetapkan juga target dan pendanaan tahun 2030, yang merupakan bagian dari periode kepemimpinan tahun 2030-2035 mendatang. Berikut ini akan dipaparkan secara rinci mengenai target indikator serta pagu anggaran untuk masing-masing Program, Kegiatan, dan Subkegiatan tersebut. Tabel di bawah ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai capaian dan kebutuhan pendanaan yang direncanakan.

Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PUPR KOTA SOLOK TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERAIKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.03.1.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					33.456.444.348,00		28.820.085.041,00		41.717.977.888,00		50.370.001.401,00		34.779.679.317,00				
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.069.543.303,00		8.183.475.734,00		7.634.037.902,00		7.904.599.282,00		7.991.523.583,00				
Meningkatnya fasilitas pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		100	100	100	9.054.449.303,00	100	8.177.981.734,00	100	7.628.543.902,00	100	7.899.105.282,00	100	7.986.029.583,00				
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.787.467.303,00		8.177.981.734,00		7.628.543.902,00		7.899.105.282,00		7.986.029.583,00				
Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN		742	742	742	6.787.467.303,00	742	8.177.981.734,00	742	7.628.543.902,00	742	7.899.105.282,00	742	7.986.029.583,00				
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN					6.787.167.303,00		8.177.981.734,00		7.628.543.902,00		7.899.105.282,00		7.986.029.583,00				
Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN		742	742	742	6.787.167.303,00	742	8.177.981.734,00	742	7.628.543.902,00	742	7.899.105.282,00	742	7.986.029.583,00				
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					300.000,00								0,00				
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													0,00				
1.03.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah					1.000.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00				
Meningkatnya fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah				12	500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.03.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengeluaran Rekrutasi Daerah	Jumlah Laporan Pengeluaran Rekrutasi Daerah (Dokumen)			500.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
Tersedianya Laporan Pengeluaran Rekrutasi Daerah			12	500.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaiab Dinas beserta Akibat Kelelgapan (Paket)			15.000.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
Meningkatnya tasilisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			0	15.000.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		1		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaiab Dinas beserta Akibat Kelelgapannya	Jumlah Paket Pakaiab Dinas beserta Akibat Kelelgapan (Paket)			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
Tersedianya Pakaiab Dinas beserta Akibat Kelelgapan			0	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			15.000.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
Tertakannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1	15.000.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
1.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0	0			0	0			0	0				
Tertakannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0	0			0	0			0	0				
1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0	0			0	0			0	0				
Tertakannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0	0			0	0			0	0				
1.03.01.2.05 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				159.850.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatnya fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rajat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			12	159.050.000,00												
	Jumlah Laporan Fasilitas Kupangan Tamu (Laporan)			12													
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)			12													
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			10													
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			1													
	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			12													
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			12													
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.750.000,00											KOTA SOLOK	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			12													
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor																	
	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			1													
1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			10													
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			12													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	TARGET (14)	PAGU (15)				
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			9.650.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			12	9.650.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan yang Disediakan (Dokumen)			0		0		0		0		0		0				
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan yang Disediakan (Dokumen)				0		0		0		0		0		0				
1.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laboran Fasilitas Kunjungan Tamu (Laboran)			4.750.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu			12	4.750.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laboran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laboran)			100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			42.250.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Mengkajinya fasilitas pekaangan tugas dan fungsi perangkat daerah.				42.250.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)																		
Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)																		
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																		
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Disediakan (Unit)																		
Jumlah Unit Perabotan dan Meubel Lainnya yang Disediakan (Unit)			6															
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			6															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)																
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar																	
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)																
1.03.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor																	
Tersedianya Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkut Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)																
1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel																	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				37.500.000,00												
1.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																
1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				4.750.000,00												
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah																	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laboran)																
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laboran)																
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laboran)																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			12	160.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			12	553.430.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Lubuk Sikarah	
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					346.752.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Meningkatnya fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)				346.752.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			4													
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			2													
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			36													
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																
	Jumlah Alat Angkut Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)																
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					317.552.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		KOTA SOLOK	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERAIKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertahan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan Perkebannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perkebannya (Unit)	(03)	38	317.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			(16)	(17)
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pertahan Axi Besar	Jumlah Axi Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perkebannya (Unit)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.03.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pertahan Axi Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Axi Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan dibayarkan Perkebannya (Unit)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.03.01.2.09.0005 - Terakannya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		2	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			KOTA SOLOK	
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		4	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			KOTA SOLOK	
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.03.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Renovasi Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					8.000.000,00				0,00					0,00			
Terdapatnya Pemeliharaan/Renovasi Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				8.000.000,00				0,00					0,00			
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengurusan, pelepasan dan evaluasi Internal Perangkat Daerah	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	17,50	17,85	18,20	4.994.000,00	18,55	4.994.000,00	18,90	4.994.000,00	19,25	4.994.000,00	19,60	4.994.000,00				
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	19,50	20,60	21,40		22,20		23,00		23,80		24,60					
	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	22,20	22,75	23,30		23,85		24,40		24,95		25,50					
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	10,80	11,15	11,50		11,85		12,20		12,55		12,90					
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.994.000,00		4.994.000,00		4.994.000,00		4.994.000,00		4.994.000,00		4.994.000,00		
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Untuk Perangkat Daerah (Data)		1		4.994.000,00	1	4.994.000,00	1	4.994.000,00	1	4.994.000,00	1	4.994.000,00	1	4.994.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Penunjang Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)																
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	2		2		2		2		2		3			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		3	3	2.194.000,00	3	2.194.000,00	3	2.194.000,00	3	2.194.000,00	3	2.194.000,00	2.194.000,00			
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		3	3	500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00	KOTA SOLOK		
1.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walikota Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walikota Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.03.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lengkap Perangkat Daerah (Data)		1	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00	KOTA SOLOK		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terbit Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah (%)	100	100	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	500.000,00			
1.03.01.2.04 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)		12	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	500.000,00			
1.03.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)		12	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	500.000,00	KOTA SOLOK		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Kawasan Perumahan Randa Bangi yang Perintangan Olen Infrastruktur Perintangan Bangi Di Wilayah sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	26,98	27,00	36,70	732.850.000,00	49,61	1.056.997.000,00	62,51	1.878.165.500,00	75,59	537.850.000,00	86,56	525.350.000,00	525.350.000,00	1.032.100.000,00 KOTA SOLOK PERANGKAT UMUM DAN PENYATAAN RUANG		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Perencanaan Luas Layanan Irigasi Hidrokomoditas Kewenangan Kab/Kota (%)		91,77	91,77	92,01		94,30		96,06		96,35							
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					470.350.000,00		711.997.000,00		1.615.685.500,00		275.350.000,00		275.350.000,00				
Rasio luas kawasan penanaman rawan banjir yang didukung oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota				1,51	470.350.000,00	0,6	711.997.000,00	0,6	1.615.685.500,00	0,5	275.350.000,00	0,5	275.350.000,00				
Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (KM)				0,14		0,24		0,55		0,9			0,9				
1.03.02.2.01.0000 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai					75.350.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			KOTA SOLOK	
Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai				1,51	75.350.000,00	0,6	30.000.000,00	0,6	30.000.000,00	0,5	25.000.000,00	0,5	25.000.000,00				
1.03.02.2.01.0126 - Rehabilitasi Tanggul Sungai					395.000.000,00		681.997.000,00		1.585.685.500,00		250.350.000,00		250.350.000,00				
Terawatnya Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (KM)				0,14	395.000.000,00	0,24	681.997.000,00	0,55	1.585.685.500,00	0,9	250.350.000,00	0,9	250.350.000,00				
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Penguatan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					262.500.000,00		345.000.000,00		262.500.000,00		262.500.000,00		262.500.000,00				
Rasio luas daeran irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			0	0,9	262.500.000,00	0,16	345.000.000,00	0,12	262.500.000,00	0,12	262.500.000,00	0,11	250.000.000,00				
Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)		0	0	0		0		0		0		0					
Panjang Jaringan Irigasi Permukiman yang Dipersekitan dan Diperlebar (KM)			0	0,5		0,3		0,3		0,3		0,3					
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman					195.000.000,00		317.500.000,00		237.500.000,00		237.500.000,00		225.000.000,00			KOTA SOLOK	
Terawatnya Jaringan Irigasi Permukiman yang Direhabilitasi (KM)		0	0,9	0,9	195.000.000,00	0,16	317.500.000,00	0,12	237.500.000,00	0,12	237.500.000,00	0,11	225.000.000,00				
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukiman					67.500.000,00		27.500.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00				
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukiman		0	0,5	0,5	67.500.000,00	0,3	27.500.000,00	0,3	25.000.000,00	0,3	25.000.000,00	0,3	25.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.03.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola TPA/Kawasan Kabupatèn/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola TPA/Kawasan Kabupatèn/Kota yang mendapat Penguatan Kapasitas (Lembaga)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	KOTA SOLOK	
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					335.500.000,00		535.000.000,00		335.500.000,00		335.500.000,00		335.500.000,00	335.500.000,00			
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	86,60	90,00	91,00	335.500.000,00	92,00	535.000.000,00	93,00	335.500.000,00	94,00	335.500.000,00	95,00	335.500.000,00	335.500.000,00	1.03.2.1.03.00.03.00 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Jaringan Perpipaan Terhubung Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terhubung Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupatèn/Kota (%)	97,83	97,84	98,00		98,50		99,00		100,00		100,00					
1.03.03.2.01 - Pengalokasian dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupatèn/Kota					335.500.000,00		535.000.000,00		335.500.000,00		335.500.000,00		335.500.000,00	335.500.000,00			
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM/ jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terhubung terhadap rumah	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)		1		335.500.000,00		535.000.000,00		335.500.000,00		335.500.000,00		335.500.000,00	335.500.000,00			
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dirangsang (user/Debit)																
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)		50			78		50		50		50		50			
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					200.000.000,00				0,00		0,00		0,00	0,00		KOTA SOLOK	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)		1	200.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dirangsang (User/Desk)			0,00	300.000.000,00	200.500.000,00	200.500.000,00	200.500.000,00	200.500.000,00	200.500.000,00	200.500.000,00	200.500.000,00	200.500.000,00	200.500.000,00		KOTA SOLOK	
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani dan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)		50	135.000.000,00	78	235.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00		KOTA SOLOK	
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGELOMBANG SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Penduduk Yang Merempok Hutan Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak Dan Aman (%)				373.100.000,00		550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00			
1.03.05.2.01 - Peningkatan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Wota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher-angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septic dengan pengolahan biyuderesial SNI 2336) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)		95,90	95,92	373.100.000,00	96,00	550.000.000,00	96,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00	550.000.000,00	1.03.2.10.0.00.03.00 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Persentase Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)				373.100.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	1	550.000.000,00		550.000.000,00	550.000.000,00			
			25	25		25		25		25		25		25			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1	1	1	1	223.100.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	390.000.000,00	1	400.000.000,00		
1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)															400.000.000,00	KOTA SOLOK	
Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1	1	1	1	223.100.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	390.000.000,00	1	400.000.000,00		
Beroperasi dan terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)															400.000.000,00	KOTA SOLOK	
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat															150.000.000,00	KOTA SOLOK	
Jumlah Ruman Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan Mosek/leher angsa dan unit pengolahan setempat anekeb (yang dapat berupa lantai seketik dengan pengolahan biotransfeksiul CMI 2388 atau unit pengolahan setempat aerob. (Ruman Tangga)	25	25	25	25	150.000.000,00	25	150.000.000,00	25	150.000.000,00	25	150.000.000,00	25	150.000.000,00	25	150.000.000,00		
Tersedianya Unit pengolahan setempat															150.000.000,00	KOTA SOLOK	
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Keajaikan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)															0,00	KOTA SOLOK	
Tersusunnya Rencana, Keajaikan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)															0,00	KOTA SOLOK	
1.03.05.2.01.0045 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE															0,00	KOTA SOLOK	
Meningkatnya kualitas sistem drainase dalam kondisi Baik (persentase)	73,12	73,50	73,96	74,42	30.000.000,00	74,88	30.000.000,00	75,34	30.000.000,00	75,81	30.000.000,00	76,27	30.000.000,00	76,74	30.000.000,00		
1.03.05.2.01 - Pengadaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Mora															2.546.448.112,00		
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik															2.546.448.112,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)			0.24													
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)																
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Drenabotasi (Sistem Drainase Perkotaan)																
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)																
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)																
1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan					0,00					0,00						2.918.948.112,00	
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)					0,00					0,00						2.918.948.112,00	
1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan					30.000.000,00					30.000.000,00						27.500.000,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan				0,24	30.000.000,00	0,24				30.000.000,00	0,24					27.500.000,00	
1.03.06.2.01.0020 - Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan										0						0	
Teroptimalisasinya Sistem Drainase Lingkungan										0						0	
1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan										0						0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERAHKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				(16)	(17)	
(01)	(02)	(03)																		
Tersusunnya Rencana Kegiatan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpeliharakan (Sistem Drainase Perkotaan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				19.812.500.000,00				9.002.197.307,00		14.205.998.111,00			14.963.945.112,00		6.012.500.000,00					
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota (%)	97,44	100,00	19.812.500.000,00	100,00	9.002.197.307,00	100,00	14.205.998.111,00	100,00	14.963.945.112,00	100,00	14.963.945.112,00	100,00	6.012.500.000,00	6.012.500.000,00					
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laku Fungsi Bangunan Gedung				19.812.500.000,00		9.002.197.307,00		14.205.998.111,00		14.963.945.112,00		14.963.945.112,00		6.012.500.000,00	6.012.500.000,00					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERAINGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Persentase Kepuasan Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Gedung (PBG)	Jumlah Penerbitan Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Gedung (PBG), Serdikot Laki Fungsi (SLF), Surat Buletin Keperluan Pembangunan Gedung (SBKMG), Rencana Teknis Pembangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (PT), Penilik, dan Penataan Pembangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)		50	19.812.500.000,00	50	9.002.197.307,00	50	14.208.998.111,00	50	14.963.548.112,00	50	6.012.500.000,00					
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemantapan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Keperluan Strategis Daerah KabupatenKota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemantapan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Keperluan Strategis Daerah KabupatenKota (Dokumen)		4	19.800.000.000,00	4	8.989.897.307,00	4	14.196.498.111,00	4	14.951.448.112,00	4	6.000.000.000,00				KOTA SOLOK	
Terdapatnya Pembangunan, Pemantapan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Keperluan Strategis Daerah KabupatenKota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemantapan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Keperluan Strategis Daerah KabupatenKota (Dokumen)		4	19.800.000.000,00	4	8.989.897.307,00	4	14.196.498.111,00	4	14.951.448.112,00	4	6.000.000.000,00					
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Gedung (PBG), Serdikot Laki Fungsi (SLF), Surat Buletin Keperluan Pembangunan Gedung (SBKMG), Rencana Teknis Pembangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (PT), Penilik, dan Penataan Pembangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penerbitan Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Gedung (PBG), Serdikot Laki Fungsi (SLF), Surat Buletin Keperluan Pembangunan Gedung (SBKMG), Rencana Teknis Pembangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (PT), Penilik, dan Penataan Pembangunan Gedung melalui SIMBG			12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00				KOTA SOLOK	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / KEGIATAN / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terselenggaranya Penerbitan Puskertajuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laki Fungsi (SLF), Surat Baku Keperluan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Perihal Teknis (TP), Perak, dan Pekerjaan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Puskertajuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laki Fungsi (SLF), Surat Baku Keperluan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Perihal Teknis (TP), Perak, dan Pekerjaan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)		50	12.500.000,00	50	12.500.000,00	50	12.500.000,00	50	12.500.000,00	50	12.500.000,00	50	12.500.000,00			
1.03.10 - PROGRAM PENYELANGGARAAN JALAN					4.013.901.045,00		9.261.765.000,00		16.792.606.375,00		20.739.584.000,00		16.334.707.622,00		1.032.100.000,03.00 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kematapan Jalan Kabupatenkota (%)	75,50	76,00	77,05	4.013.901.045,00	78,56	9.261.765.000,00	80,52	16.792.606.375,00	82,03	20.739.584.000,00	83,13	16.334.707.622,00				
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupatenkota					4.013.901.045,00		9.261.765.000,00		16.792.606.375,00		20.739.584.000,00		16.334.707.622,00				
Tingkat Kematapan Jalan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)		0,7		4.013.901.045,00	0,5	9.261.765.000,00	0,5	16.792.606.375,00	0,5	20.739.584.000,00	0,5	16.334.707.622,00				
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)																
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampal Pengerasan (KM)																
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)		1,33			3,49		1,63		1,63		3,24					
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)		1,04			0,83		0,87		0,87		0,83					
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)		0,9			3,2		11		14		9					
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						0		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)			1,04	125.000.000,00	0,83	100.000.000,00	0,87	105.000.000,00	0,87	105.000.000,00	0,83	100.000.000,00	100.000.000,00		KOTA SOLOK	
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sempal Penerasan (KM)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)			0,9	2.261.765.000,00	3,2	4.950.000.000,00	11	14.475.841.375,00	14	18.422.819.000,00	9	12.322.942.632,00	12.322.942.632,00		KOTA SOLOK	
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Benkas Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Benkas (KM)			1,33	1.600.636.045,00	3,49	4.194.265.000,00	1,83	2.194.265.000,00	1,83	2.194.265.000,00	3,24	3.894.265.000,00	3.894.265.000,00		KOTA SOLOK	
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara secara Rutin (Jembatan)			0,7	26.500.000,00	0,5	17.500.000,00	0,5	17.500.000,00	0,5	17.500.000,00	0,5	17.500.000,00	17.500.000,00		KOTA SOLOK	
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					15.700.000,00		27.700.000,00		15.700.000,00		15.700.000,00		10.700.000,00	10.700.000,00			
Meningkatnya kompetensi tenaga kontrak	Rasio tenaga operator/teknisi/ahli yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	2,08	3,00	4,00	15.700.000,00	5,00	27.700.000,00	6,00	15.700.000,00	7,00	15.700.000,00	6,00	10.700.000,00	10.700.000,00	1.03.2.10.0.00.03.00 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.11.2.01 - Penyeleksi-an Pelaman Tenaga Terampil Konstruksi					10.000.000,00		22.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00			
Meningkatnya kompetensi tenaga kontrak	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis yang Dilatih (Orang)			25	10.000.000,00	35	22.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	15	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis yang Mendapatkan Pelatihan					10.000.000,00		22.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00			
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis yang Mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)			25	10.000.000,00	35	22.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	15	5.000.000,00	5.000.000,00		KOTA SOLOK	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				2.750.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00			
Meningkatnya kompetensi tenaga kontrakt	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)		3	2.750.000,00	3	2.750.000,00	3	2.750.000,00	3	2.750.000,00	3	2.750.000,00	3	2.750.000,00			
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				2.750.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00		KOTA SOLOK	
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)		3	2.750.000,00	3	2.750.000,00	3	2.750.000,00	3	2.750.000,00	3	2.750.000,00	3	2.750.000,00			
1.03.11.2.04 - Pengawasan Terpadu, Terdiri Penyelenggaraan dan Pemantauan Jasa Konstruksi				2.950.000,00	2.950.000,00		2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00			
Meningkatnya kompetensi tenaga kontrakt	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Terdiri Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)		50	2.950.000,00	50	2.950.000,00	50	2.950.000,00	50	2.950.000,00	50	2.950.000,00	50	2.950.000,00			
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Terdiri Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				2.950.000,00	2.950.000,00		2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00		KOTA SOLOK	
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Terdiri Penyelenggaraan Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Terdiri Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)		50	2.950.000,00	50	2.950.000,00	50	2.950.000,00	50	2.950.000,00	50	2.950.000,00	50	2.950.000,00			
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				72.950.000,00	72.950.000,00		172.950.000,00	72.950.000,00	72.950.000,00	72.950.000,00	72.950.000,00	72.950.000,00	72.950.000,00	72.950.000,00			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Keseluruhan Pemantauan Ruang Dengan RTRW (%)	76,50	76,50	77,50	72.950.000,00	77,50	172.950.000,00	78,00	72.950.000,00	78,50	72.950.000,00	79,00	72.950.000,00	72.950.000,00	1.03.2.10.00.03.00 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTT) Kabupaten/Kota				27.550.000,00	27.550.000,00		127.550.000,00	27.550.000,00	27.550.000,00	27.550.000,00	27.550.000,00	27.550.000,00	27.550.000,00	27.550.000,00			
Persentase ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang	Jumlah Rencana RTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	27.550.000,00	1	127.550.000,00	1	127.550.000,00	1	27.550.000,00	1	27.550.000,00	1	27.550.000,00			
	Jumlah dokumen administrasi peninjauan kembali RTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	27.550.000,00	1	127.550.000,00	1	127.550.000,00	1	27.550.000,00	1	27.550.000,00	1	27.550.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penentuan persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota			1	27.550.000,00		27.550.000,00	1	27.550.000,00		27.550.000,00	1	27.550.000,00		27.550.000,00		
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Penanda RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)				0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantapan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Persetujuan KICPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)			2	12.750.000,00		12.750.000,00	2	12.750.000,00		12.750.000,00	2	12.750.000,00		12.750.000,00		
1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemantapan Ruang yang Berdampak Diproses	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemantapan ruang (Dokumen)				0,00		12.750.000,00		0,00		12.750.000,00		0,00		12.750.000,00		
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemantapan Ruang	Jumlah dokumen Persetujuan KICPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)			2	12.750.000,00		12.750.000,00	2	12.750.000,00		12.750.000,00	2	12.750.000,00		12.750.000,00		
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemantapan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)			5	32.650.000,00		32.650.000,00	5	32.650.000,00		32.650.000,00	5	32.650.000,00		32.650.000,00		
	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Pemantapan Ruang (Dokumen)			2				2				2					
	Dokumen berbasis data spasial hasil Pemantapan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemantapan Ruang (Dokumen)			2				2				2					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)			10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(15)	KOTA SOLOK	(17)
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2			
1.03.12.2.04.0007 - Peningkatan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR					7.650.000,00		7.650.000,00		7.650.000,00		7.650.000,00		7.650.000,00			KOTA SOLOK	
Tertaksannya tindakan kegiatan Penegakan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)			5	7.650.000,00	5	7.650.000,00	5	7.650.000,00	5	7.650.000,00	5	7.650.000,00	5			
1.03.12.2.04.0008 - Peningkatan Pelaksanaan Keresediaan Kegiatan Pemertan Ruang Garapan Penyataan mandiri sebagai UMK					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			KOTA SOLOK	
Tersedianya dokumen teknis dan sosial hasil Penelitian pelaksanaan Keresediaan Kegiatan Pemertan Ruang	Dokumen teknis dan sosial hasil Penelitian pelaksanaan Keresediaan Kegiatan Pemertan Ruang (Dokumen)			2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2			
2.10 - URUSAN PEMERTAHAN BIDANG PERTANAHAN					0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00				
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00				
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Tersesalainya Kasus Tanah Garapan Belum Bersempuk Yang Diakukan Melalui Mediasi (%)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	1.03.2.10.0.00.03.00 00 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAHAN RUANG		
2.10.04.1.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00				
Penarungan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Penyelesaian Kasus Perantaraan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	3	3	0	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1			
2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Perantaraan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			KOTA SOLOK	
Tertaksannya Mediasi Penyelesaian Kasus Perantaraan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Kasus Perantaraan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	3	3	0	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1			
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN SANKSI PERANGKAT DAN SANKSI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00				
					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	0,00	0,00	0,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00		
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKota					0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKota (Dokumen)	3	0	0,00	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKota					0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	KOTA SOLOK	
Tertatanya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKota (Dokumen)	3	0	0,00	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan, Dinas PUPR Kota Solok mengemban tanggungjawab untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya. Program prioritas yang dimaksud mengarah kepada program-program yang menjadi fokus utama Pemerintah pusat, yaitu program-program yang terkait dengan 8 program utama Presiden (asta cita).

Pada periode 2025-2029, selaras dengan program percepatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Dinas PUPR Kota Solok memiliki 3 program prioritas utama, yaitu: 1) peningkatan layanan jaringan irigasi dalam rangka mendukung upaya swasembada pangan, 2) peningkatan layanan penyediaan sumber air minum layak/aman bagi masyarakat sebagai bagian dalam upaya mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta penurunan angka stunting, dan 3) peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang daerah, dalam rangka peningkatan pelayanan perkotaan dimana Kota Solok menjadi bagian dari kawasan pendukung terhadap pengembangan kawasan strategis nasional yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Secara lengkap, uraian program dan kegiatan prioritas pada Dinas PUPR Kota Solok dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

TABEL 4.3
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.03.2.10.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap ingasi	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
2.	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perijapan	
3.	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Keberhasilan pelaksanaan rencana program kegiatan pada Renstra Dinas PUPR Kota Solok tahun 2025-2029 diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU menjadi instrumen yang menggambarkan capaian kinerja secara keseluruhan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Indikator dan target yang ditetapkan kemudian menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi kinerja tahunan Dinas PUPR. Tabel 4.5 menjabarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Kota Solok dari tahun 2025 sampai 2030.

Selain IKU, Keberhasilan penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Urusan Pertanahan yang menjadi tanggungjawab Dinas PUPR Kota Solok selama periode 2025-2029 ini diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK berfungsi sebagai instrumen untuk menilai efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Tabel 4.6 menjabarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PUPR Tahun selama 2025-2030.

Tabel 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA DINAS PUPR KOTA SOLOK 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.03.2.10.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
2.	Indeks Kinerja Infrastruktur ke-Pu-ian	Indeks	79,24	80,04	81,51	83,68	86,08	88,39	90,06	
3.	Persentase Keterjalinan Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW	%	76,50	76,50	77,00	77,50	78,00	78,50	79,00	
4.	Persentase Luas Layanan Higasi Multykomoditas Kewenangan Kab/Kota	%	91,77	91,77	92,01	94,30	95,06	95,60	96,35	
5.	Nilai CAKIP Peringkat Daerah	Angka	70,30	72,35	74,4	76,45	78,50	80,55	82,60	
6.	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perbaikan	%	86,60	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
7.	Persentase Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir Yang Terdilindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	%	26,98	27,00	36,70	49,61	62,51	75,59	86,56	
8.	Tingkat Kemudahan Jalan Kabupaten/Kota	%	75,50	76,00	77,05	78,56	80,52	82,03	83,13	
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangka Daerah	Angka	82,65	83,00	85,00	85,50	86,00	87,00	88,35	
10.	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	73,12	73,50	73,96	74,42	74,88	75,34	75,81	
11.	Persentase Perilaku Yang Menempati Hunian Dengan Akses Ganiasi (Air Limbah Domestik) Layak Dan Aman	%	95,84	95,90	95,92	96,00	98,00	100,00	100,00	
12.	Indeks Pelayanan Publik Peringkat Daerah	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	

Tabel 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI
RENSTRA DINAS PUPR KOTA SOLOK 2025-2029

NO (01)	INDIKATOR (02)	STATUS (03)	SATUAN (04)	BASELINE TAHUN 2024 (05)	TARGET TAHUN					KETERANGAN (12)	
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)		2030 (11)
1.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Indeks Kinerja Infrastruktur ke-PU-an	positif	Indeks	79,24	80,04	81,51	83,68	86,08	88,39	90,06	
2.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW	positif	%	76,50	76,50	77,00	77,50	78,00	78,50	79,00	
3.	Tingkat Kemanjapanaan Jalan kabupaten/kota	positif	%	75,50	76,00	77,05	78,56	80,52	82,03	83,13	
4.	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Kab/Kota	positif	%	91,77	91,77	92,01	94,30	95,06	95,60	96,35	
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Angka	70,30	72,35	74,4	76,45	78,50	80,55	82,60	
6.	Persentase Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	positif	%	26,98	27,00	36,70	49,61	62,51	75,59	86,56	
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	positif	Angka	82,65	83,00	85,00	85,50	86,00	87,00	88,35	
8.	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	positif	Persentase	73,12	73,50	73,96	74,42	74,88	75,34	75,81	
9.	Persentase Penduduk Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak Dan Aman	positif	%	95,84	95,90	95,92	96,00	96,00	100,00	100,00	
10.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	kumulatif	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	
11.	Persentase Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spem Jaringan Perpipaan Terlindungi Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten/Kota	positif	%	97,83	97,84	98,00	98,50	99,00	100,00	100,00	
12.	Persentase Kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/kota	positif	%	97,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13.	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
14.	Terselenggarakannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat Yang Dilakukan Melalui Mediasi	positif	%	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Renstra Dinas PUPR Kota Solok Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam kurun waktu 2025–2030, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok menargetkan meningkatnya peran dan kontribusinya dalam pembangunan di Kota Solok.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Renstra Dinas PUPR Kota Solok Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari pelaksanaan program-program pembangunan yang telah disusun di dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029, khususnya yang terkait pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Secara hierarki, Renstra Dinas PUPR ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan Renja Perubahan Dinas PUPR Kota Solok dari tahun 2026 sampai tahun 2030. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Penetapan target Indikator kinerja Dinas PUPR Kota Solok dalam Renstra PUPR ini dilakukan dengan mempedomani target indikator kinerja pada RPJMD Kota Solok tahun 2025-2029;
2. Program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah program minimal dan wajib harus diikuti. Perangkat Daerah boleh menambah kegiatan lain bila anggaran memungkinkan dengan prosedur penambahan melalui telaahan staf kepada Bapak Walikota yang dilengkapi proposal kegiatan, untuk dimasukkan ke dalam Renja Perangkat Daerah;
3. Prosedur penambahan kegiatan pada Renja Perangkat Daerah yang belum dicantumkan pada Renstra Perangkat Daerah seminimalnya harus sesuai dan mendukung pencapaian arah kebijakan/strategi/program prioritas pada RPJMD Kota Solok tahun 2025-2029 dan/atau merupakan usulan dari masyarakat dengan alurnya harus dikoordinasikan dengan Perangkat daerah yang mampu urusan perencanaan dan penganggaran;
4. Renstra Dinas PUPR Kota Solok Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas PUPR Kota Solok tahun 2025-2029;
5. Implementasi Renstra Dinas PUPR Kota Solok Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan koordinator Kepala Dinas;

6. Renstra Dinas PUPR Kota Solok Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Dinas PUPR yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Kepala Dinas dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintah daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas PUPR Kota Solok tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan/implementasinya tetap selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur. Mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana tersebut di atas, dilakukan melalui :

1. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja.
 - Dilaksanakan secara berkala melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun.
 - Memuat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta analisis pencapaian sasaran.
2. Reviu Tengah Periode Renstra.
 - Dilakukan pada tahun ke-3 untuk mengevaluasi pencapaian setengah waktu dan menyesuaikan strategi jika diperlukan.
 - Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
3. Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja dan Evaluasi.
 - Pemantauan dilakukan melalui aplikasi e-SAKIP, SIPD, serta instrumen digital lainnya yang mendukung keterpaduan data.

Semoga Rencana Strategis Dinas PUPR Kota Solok ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK



RAMADHANI KIRANA PUTRA